

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA**

Leni Fitrianti
Lenifitrianti91@gmail.com

Abstrak

Manajemen keuangan pendidikan merupakan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan meliputi penyusunan atau perencanaan anggaran (Budgeting), pembukuan (Accounting), pemeriksaan (Auditing), dan pertanggung jawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Tempat dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Airmolek, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Riyadatul Muta'allin Airmolek, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Pasir Penyu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Falah Airmolek, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pasir Penyu, Madrasah Aliyah (MA) Nurul Falah Airmolek, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pasir Penyu. Pelakunya Kepala Sekolah dan Bendaharawan. Sedangkan kegiatannya yang diamati adalah pengelolaan keuangan pendidikan. Data yang didapatkan dengan wawancara dianalisis dengan teknik Miles dan Huberman. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan sekolah negeri dan swasta sudah berjalan dengan baik. Dimana sekolah sudah melakukan perencanaan anggaran keuangan untuk satu tahun ke depan dengan cara bermusyawarah yang melibatkan kepala sekolah/madrasah, bendahara, komite, guru, staf dan tim IT. Anggaran ini dituangkan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Setiap realisasi anggaran dipertanggungjawabkan dan dibukukan melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dilaporkan manual ke dinas pendidikan dan secara online ke Kemenag dan Kemendikbud. Selanjutnya, pengawasan untuk dana yang bersumber dari komite dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah. Sedangkan dana dari pemerintah (BOS) diaudit oleh BPK (Badan Pengawasan Keuangan). Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pemberian catatan perbaikan yang harus segera diperbaiki pihak pengelola keuangan.

Kata Kunci: Analisis, Manajemen Keuangan Pendidikan

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai. Untuk itu kecukupan pendanaan (keuangan) adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan pendidikan yang bermutu. Namun banyaknya sumber pendanaan tidak menjadi jaminan kualitas pendidikan manakala tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Mujammil Qomar, keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang di pimpinnya.¹

Ketersediaan dana yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak mustahil pemborosan, ketidak sesuaian belanja dengan rencana atau bahkan penyelewengan dana bisa saja terjadi, untuk itu perencanaan yang baik, kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan dan pertanggung jawaban perlu di manajemen dengan baik.²

Seorang kepala sekolah sebagai perencana anggaran sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan, karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengolahan dana. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah, maupun pihak lainnya memerlukan manajemen yang baik. Sebesar apapun dana sekolah bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran.³

Manajemen keuangan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus, tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan.⁴ Hal ini senada dengan Tandililing yang mengatakan perlunya transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah, karena

¹Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. VI, No. 1, April 2018. h. 68

²*Ibid.*

³Hardi Fardiansyah, dkk, *Manajemen Pendidikan (Tinjauan pada Lembaga Pendidikan Formal)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2022), h. 146

⁴Rita Pusvitasari dan Mukhamad Sukur, *Manajemen Keuangan sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)*, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 04 No. 01 (2020), h. 95

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

sangat berpengaruh terhadap motivasi mengajar guru. Begitu juga dengan Anam yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa; sumber keuangan sekolah yang didapatkan dari masyarakat harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, agar supaya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan terus meningkat.⁵

Penelitian Adillah menunjukkan bahwa; untuk mendapatkan dana guna memenuhi berbagai kebutuhannya, sekolah harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang yang ada, baik terhadap wali murid, komite sekolah maupun terhadap pemerintah. Dalam pengelolaannya, menurut sekolah perlu melibatkan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal untuk mengawal sistem keuangan yang ada. Melalui pelibatan tersebut, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sistem keuangan sekolah, mulai dari partisipasi, pemenuhan kebutuhan sekolah, sampai pada pengawasannya. Selanjutnya dalam penelitiannya menegaskan bahwa; manajemen keuangan harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan dan pemanfaatan, sampai dengan pengawasan.⁶

Sekolah mempunyai pengaturan terkait penyerapan anggaran sekolah yang digunakan dalam menjalankan roda pendidikan di sekolah, baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Maka penelitian ini hadir dalam rangka untuk memahami dan menganalisis manajemen keuangan pendidikan di sekolah negeri dan swasta mulai dari perencanaan anggaran, pembukuan, pengawasan, dan hal-hal lain terkait harus di kelola dengan baik.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan yaitu sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fattah Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya David Wijaya menyebutkan, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.⁷

Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah memiliki peranan besar di dalamnya. Peran pemerintah mencakup pada perlindungan pemerintah terhadap

⁵*Ibid.*, h. 96

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h.70

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

anak dibawah umur, pengaruh eksternal peran pendidikan agar demokrasi berjalan, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta tuntutan “norma umum” dan pengaruh pendidikan.⁸

B. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Arwidayanto dkk, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau perencanaan anggaran (*Budgeting*), pembukuan (*Accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*)

Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis *cost effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.⁹ Dalam penyusunan anggaran pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, Komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelola keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Hemat sesuai dengan kebutuhan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, (3) tidak diperkenankan menggunakan dana keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar.¹⁰

2. Pembukuan (*Accounting*)

Pembukuan (*Accounting*) dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal: Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Berikut ini beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah: buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, neraca percobaan.

3. Pemeriksaan (*Auditing*)

Pemeriksaan (*Auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau

⁸Mohamad Rojii, dkk, *Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), h. 4

⁹Arwidayanto, dkk, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Jabar: Widya Padjadjaran, 2017), h. 24

¹⁰Rita Pusvitasari dan Mukhamad Sukur, *op.Cit.*, h. 72

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing yakni: (1) pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. (2) pemeriksaan (audit) operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi.

Pengawasan (*Controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan keuangan/anggaran pendidikan adalah aktivitas-aktivitas melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, nilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan. Pemeriksaan (*Auditing*) atau audit keuangan pendidikan merupakan bagian dari pengawasan. suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan catatan pembukuan dan bukti bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Adalah kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut penggunaan anggaran pendidikan termasuk mengusut tata cara pembukuan. Pemeriksaan merupakan tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya yang harus diperiksa terdiri dari neraca laporan laba rugi laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Catatan pembukuan terdiri dari buku harian, buku besar dan buku pembantu. Bukti pendukung antara lain bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas, faktur penjualan, jurnal, dan lainlain. Dokumen lain yang perlu diperiksa antara lain notulen rapat, akte pendirian, kontrak perjanjian kredit dan lain-lain.¹¹

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwidayanto dkk, Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: (1) kepala dinas pendidikan, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.¹²

¹¹Riinawati, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, (Lhokseumawe: Radja Publika, 2020), h.

¹²Arwidayanto, dkk, *op.Cit.*, h. 30

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRANHalaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>**C. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan**

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.

1. Pemerintah

Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Dana dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta didik kelas I, II, dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan anggaran tersebut. Selain DIK pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah.

2. Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) Dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. (2) Dana *incidental* merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. (3) Dana suka rela. Adalah pendanaan yang diberikan secara suka rela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik.

3. Masyarakat

Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya suka rela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.

4. Dana dari alumni

Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai bentuk pembekalan diri terhadap

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini dapat diterima dari alumni yang diberikan secara langsung oleh individu maupun kelompok baik melalui acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.

5. Dana Dari Peserta Kegiatan

Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Seperti kegiatan yang diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diinginkan peserta didik seperti kegiatan pengembangan diri tata boga, tata busana, pramuka, dan lain-lain.

6. Dana dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru, dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.¹³

D. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

1. Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Selain itu transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan disebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media online web site lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya.

¹³Rita Pusvitasari dan Mukhamad Sukur, *op.Cit.*, h. 74-75

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku pihak sekolah membelajarkan uang secara bertanggung jawab. Ada tiga syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas public yakni: (1) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (2) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan, dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat.

3. Efektivitas

Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Kompri mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi misi lembaga. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas *outcomes* nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dilihat dari segi hasil kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas. Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁷ (1) Prinsip keadilan. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu : besarnya pendanaan pendidikan, (dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (2) Prinsip Efisiensi, mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan hasil. (3) Prinsip transparansi, artinya menekankan

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari segi sumber keuangan pendidikan, jumlahnya, rincian kegunaannya, maupun pertanggung jawabannya. Secara keseluruhan harus jelas dan sesuai dengan kenyataannya dan pelaksanaannya. (4) prinsip akuntabilitas publik. Artinya penggunaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggung jawabkan, pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan.¹⁴

E. Tugas Pengelola Keuangan

Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga pemanfaatan dana.¹⁵

F. Proses Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan Anggaran

Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Menurut Terry dalam Syarifudin mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup pengambilan

¹⁴Nur Komariah, *op.Cit.*, h. 81

¹⁵*Ibid.*, h. 82

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Selanjutnya menurut E. Mulyasa, perencanaan financial yang disebut budgeting adalah kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya, hendaknya kepala sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Berdasarkan jenisnya, sumber pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yakni (1) Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Misalnya: Anggaran Rutin (DIK), anggaran operasional, pembangunan dan perawatan (OPF), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (2) Wali peserta didik, misalnya SPP. (3) Masyarakat, misalnya: sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lainlain. Untuk dapat menggerakkan sumber-sumber pendanaan tersebut, peran kepala sekolah untuk menyusun perencanaan yang baik mutlak diperlukan.¹⁶

Pentingnya perencanaan yang baik telah digambarkan di dalam al-Qur'an surat al-Hasyr :18- 19 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."

2. Strategi Mencari Sumber Dana Sekolah

Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan, dengan pendanaan yang ada kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan di capai. Berikut ini di antara strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah: *Pertama*, Membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap *survive* dengan membangun usaha-usaha

¹⁶*Ibid.*, h. 84

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRANHalaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

sekolah seperti pengembangan usaha koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dipilih oleh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis untuk menggali sumber pembiayaan sekolah, karena tidak hanya terbatas pada penyediaan barang saja berupa penyediaan perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti foto kopi, bus antar jemput sekolah, penyediaan layanan jasa sewa ruko, rumah kos dan lain-lain. Dengan pengelolaan serta manajemen yang tepat tidak mustahil sekolah mampu memiliki kemandirian secara financial bahkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar. *Kedua*, Membuka kursus (kegiatan luar sekolah). Penyelenggaraan kegiatan berupa layanan kursus merupakan salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan sekolah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Kegiatan sifatnya terbuka untuk umum tidak diwajibkan bagi siswa. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat umum (luar sekolah) sebagai peserta. Kegiatan ini selain mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk mengenali potensi yang dimiliki masing-masing siswa, kegiatan ini juga mampu menggali pembiayaan pendanaan sekolah untuk mencapai kemandirian pembiayaan. Di antara contoh-contoh bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam bentuk usaha kursus adalah : (1) kursus bahasa baik bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain, (2) kursus computer, (3) membuka kelas tari atau pencak silat, kursus tata busana, (4) kursus tata boga dan lain-lain. *Ketiga*, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Namun pengajuan dana kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta merta dan disetiap saat. *Keempat*, penggalangan dana dari para donatur. Sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur tetap maupun tidak tetap. *Kelima*, penggalangan dana dari para alumni. Penggalangan dana dari para alumni yang sudah sukses bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap survive. Penggalangan dana bisa bersifat tetap dan bisa juga tidak tetap. *Keenam*, Dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Sumber pembiayaan dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.¹⁷

3. Penggunaan Keuangan Sekolah

Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang

¹⁷*Ibid.*, h. 85-87

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Dalam Widjanarko disebutkan staf yang dipilih untuk mengelola keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut: pembukuan, peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pimpinan, memahami bahwa bertugas dibidang keuangan merupakan pelayanan, tanggap terhadap tugas, dan memahami bahwa kurang tanggapnya dalam bekerja akan mengurangi kelancaran pencapaian tujuan.

4. Pengawasan dan Evaluasi Anggaran

Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manager sekolah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Komaruddin langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar. Pengawasan dimulai dengan mengembangkan batasan atau rincian strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan.
 - b. Pengukuran pelaksanaan, adalah kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada perencanaan yang telah ditetapkan.
 - c. Penilaian pelaksanaan, adalah kegiatan menentukan makna terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap keuangan sekolah.
 - d. Perbaikan. Merupakan kegiatan yang mengupayakan penyesuaian-penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan yang telah terjadi.
5. Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Sekolah

Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya. Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, semakin baik kondisi keuangan sekolah maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRANHalaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

sekolah. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah.¹⁸

HASIL PENELITIAN

Manajemen keuangan pendidikan merupakan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sejumlah uang yang didapatkan dari berbagai sumber dana akan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain.

Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: Penyusunan atau perencanaan anggaran (*Budgeting*), pembukuan (*Accounting*), pemeriksaan (*Auditing*), dan pertanggung jawaban. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain terkait sejumlah uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan. Pembukuan (*Accounting*) merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan guna pertanggungjawaban keuangan yang didapatkan. Dalam pembukuan pihak berwenang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan pembiayaan pendidikan. Pemeriksaan (*Auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Pengawasan keuangan/anggaran pendidikan adalah aktivitas-aktivitas melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan merupakan tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Catatan pembukuan terdiri dari buku harian, buku besar dan buku pembantu. Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi *stakeholder* lembaga pendidikan. Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat dilakukan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: Kepala dinas pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.

¹⁸*Ibid.*, h. 88-90

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRANHalaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Dalam mengelola keuangan pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang agar berjalan dengan baik. Diantaranya, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan disebarkan lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media *online website* lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas *outcomes*nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan dapat dikatakan efisien jika mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu dalam memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya, secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya. Kemudian, orang Tua Siswa (peserta didik), masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.

Sumber keuangan dari pemerintah yang diberikan kepada setiap sekolah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. Dana *incidental* merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. Dana suka rela. Adalah pendanaan yang diberikan secara suka rela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik.

Pendanaan dari masyarakat yang sifatnya suka rela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Selanjutnya, dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini dapat diterima dari alumni yang diberikan secara langsung oleh individu maupun kelompok baik melalui acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.

Berikutnya, dana dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru, dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.

Berdasarkan analisa di atas diketahui bahwa manajemen keuangan pendidikan di sekolah negeri ataupun swasta sudah dapat dikatakan dengan baik. Dimana ruang lingkup manajemennya sendiri sudah terpenuhi. Yakni ada perencanaan atau penyusunan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.

Perencanaan atau penyusunan anggaran di sekolah negeri dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama baik dengan melibatkan banyak pihak. Yakni, kepala sekolah, bendahara, komite, guru, staff tat usaha, bahkan tim IT sekolah. Hal ini dilakukan agar semua terlibat dalam rencana keberhasilan yang ingin dicapai setiap tahunnya. Kegiatan perencanaan ini dilakukan di awal atau akhir tahun. Hasil rencana yang telah disusun dan disepakati bersama tersebut dituangkan ke dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Adapun model penganggaran yang digunakan adalah model butir perbutir dan model perprogram. RKAS yang telah selesai disahkan oleh kepala sekolah, bendahara dan komite. Selanjutnya, pencatatan keuangan dimuat dalam buku kas yang direcord BPAK melalui dinas pendidikan setiap enam bulan sekali. Dan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah kepala sekolah dan bendahara. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh tim audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Inspektorat. Dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak sekolah terkait dana yang didapatkan adalah dengan membuat laporan keuangan atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Yang kemudian diperiksa oleh tim audit dengan membandingkan rencana anggaran dengan pembukuan serta realisasinya di lapangan.

Untuk sumber dana sekolah negeri berasal dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Dana yang dimaksud adalah dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Dana BOS untuk tingkat SD hanya berasal dari pemerintah pusat. Sementara untuk SMP dan SMA ditambah dengan BOSDA. Jumlah dana yang diberikan sesuai dengan jumlah siswa pertahunnya. Siswa SD perindividu sebesar Rp. 900.000, SMP Rp. 1.100.000, SMA Rp. 1.500.000 dan SMK Rp. 1.600.000. Jadi dana BOS yang diterima sekolah adalah jumlah siswa dikali dengan jatah perindividu. Dana BOS ini diperuntukan untuk beberapa hal, sesuai dengan Juknis yang telah diberikan. Dan sesuai dengan standar yang mesti dipenuhi pihak sekolah. Selanjutnya, dana BOS ini dilaporkan dengan dua jalur. Pertama, dilaporkan secara manual kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Kedua, dilaporkan secara *online* kepada KEMENDIKBUD. Adapun tindak lanjut setelah

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

kegiatan audit dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap laporan jika ditemukan kesalahan atau ketidakwajaran oleh tim audit. Sanksi hanya diberikan untuk kesalahan tingkat tinggi seperti manipulasi data yang tidak sesuai dengan realitanya. Sanksi bisa diberikan dalam bentuk pengembalian uang tersebut.

Perencanaan anggaran di sekolah swasta juga dilakukan dengan musyawarah. Yang terlibat dalam perencanaan anggaran tersebut adalah Kepala Madrasah, Bendahara, Waka, dan komite. Pihak yang berwenang mengesahkan rencana anggaran ialah Kepala Madrasah dan Ketua Komite. Selanjutnya, proses pembukuan dituangkan dalam bentuk LPJ (laporan pertanggungjawaban) dan BKU (buku kas umum). Jenis-jenis buku terkait keuangan meliputi BKU (buku kas umum) ada yang perbulan dan pertahun. Untuk mekanisme pengawasan keuangan di sekolah swasta berupa dana komite tidak ada pengawasan sedangkan dana BOS yaitu pengawasan dari kementerian agama, dilakukan setiap akan turun dana BOS per enam bulan sekali yang dinamakan monitoring BOS. Tim audit untuk dana BOS adalah tim dari kementerian agama kabupaten. Untuk dana komite dipertanggung jawabkan/ dilaporkan kepada kepala madrasah sedangkan untuk dana BOS dipertanggung jawabkan/ dilaporkan kepada pusat kementerian agama melalui aplikasi e-RKAM.

Adapun sumber dana yang didapat di sekolah swasta berasal dari pemerintahan yaitu dana BOS dan dana dari komite seperti SPP dan infaq dari wali murid dan PPDB. Sistem pelaporan dana BOS melalui aplikasi yang bernama e-RKAM (Rencana Kerja Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik). besaran dana bos tingkat MI Rp. 900.000 perkepala, MTs Rp. 1.100.000, dan MA Rp. 1.500.000. Yang kemudian dikalikan dengan banyaknya jumlah siswa setiap tahunnya.

Kendala yang ditemukan bendahara dalam pengelolaan keuangan, baik sekolah negeri maupun umum sama. Yakni kendala terkait aplikasi online yang langsung terhubung dengan kemendikbud atau Kemenag. Contoh, dalam penyusunan anggaran, ada barang-barang yang sangat dibutuhkan tapi tidak tersedia diaplikasi dan harga juga tidak sesuai. Sehingga, harus pergi langsung ke dinas pendidikan provinsi untuk menyampaikan hal tersebut. Berikutnya, dalam hal pelaporan sering ditemukan kendala tidak mendapatkan kwitansi dan cap toko. Karena tidak semua toko memiliki itu.

PENUTUP

Manajemen keuangan pendidikan di sekolah negeri dan swasta sudah berjalan sesuai dengan ruang lingkup manajemen keuangan itu sendiri. Ruang lingkup tersebut meliputi perencanaan atau penyusunan anggaran, pembukuan, pemeriksaan dan atau pengawasan, serta pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran dilakukan diawal atau akhir semester dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh kepala sekolah/madrasah, bendahara, komite, guru, staff, dan IT sekolah. Hasil rencana anggaran ini dimuat dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah, bendahara dan komite. Pelaksanaan

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

anggaran selalu disertai dengan catatan keuangan yang lengkap dengan bukti fisik. Bentuknya ada yang menggunakan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), laporan keuangan, buku kas umum, dll. Ini artinya, pembukuan keuangan tersebut dilakukan dengan baik. Tujuannya adalah agar keuangan yang diterima dan dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang saat audit dilakukan.

Untuk sumber dana yang sekolah negeri dan swasta dapatkan berasal dari pusat dan daerah berupa dana BOS dan BOSDA. Selain itu, ada juga dana yang didapatkan dari komite seperti SPP, PPDB, dan uang pembangunan. Tidak hanya itu, ada juga sumber dana dari usaha sekolah seperti kantin. Pengawasan dana komite dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah. Sedangkan pengawasan dana BOS dilakukan oleh tim audit yang telah ditentukan pihak yang berwenang. Dan pelaporannya dilakukan dengan dua cara, secara manual dan online yang terhubung dengan Kemendikbud dan Kemenag.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, dkk. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Jabar: Widya Padjadjaran.
- Hardi Fardiansyah, dkk. (2022). *Manajemen Pendidikan (Tinjauan pada Lembaga Pendidikan Formal)*, Bandung: Widina Media Utama.
- Iqbal Hasan. (2009). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail Keri. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. STAIN Watampone.
- Mohamad Rojii, dkk. (2020). *Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. VI, No. 1, April 2018.
- Riinawati. (2020). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Lhokseumawe: Radja Publika.
- Rita Pusvitasari dan Mukhamad Sukur, *Manajemen Keuangan sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)*, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 04 No. 01 (2020).